

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kekayaan pejabat tergantung yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yaitu : Kebijakan-kebijakan yang bertujuan kesejahteraan rakyat masa pandemi, rendahnya pengeluaran belanja pejabat selama pandemi, Merangkap jabatan sehingga bisa mendapatkan pemasukan lebih besar dan latar belakang kesuksesan mereka sebelum menjabat menjadi pengusaha swasta.
2. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dirasa cukup efektif, namun sejumlah kebijakan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung semuanya perihal dampak positifnya, hal ini akan dirasakan secara berjangka kedepannya. Pemerintah menyusun segala kebijakan bertujuan agar masyarakat merasakan kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan maupun keadilan.

B. Saran

Kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Masa Pandemi Covid-19 seharusnya peraturan-peraturan diperketat bertujuan agar pejabat negara fokus dengan tanggung jawabnya seperti

mengutamakan kewajiban tugas sebagai pejabat negara bukan mengutamakan bisnis perusahaannya.

2. Sebagai warga negara kita dapat membantu pemerintah dengan cara mengikuti segala kebijakan yang ada untuk menyongsong *welfare state*.

Daftar Pustaka

SUMBER BUKU

- Agus, Mustaqim. (2018), *Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang*. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- BAPPENAS, (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Aksi*. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- Cekli Setya Pratiwi. (2020) *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta
- Hariwijaya, (2017). *Rahasia Lolos Seleksi CPNS TNI dan Polri*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Juaningsih, I. N. (2020). *Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Buletin Hukum Dan Keadilan, 4 (1), 189–196.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018) *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Kencana
- Ristyawati, A. (2020). *Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus*. Administrative Law & Governance Journal, 3(2), pp. 240–249.
- Ronny Hanitjo Soemitro, (2012). *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sudarma, (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta
- Tedi, Sudrajat. (2021). *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teuku, Saiful. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Sleman: Deepublish.

SUMBER LAIN / INTERNET

- Detik.news, “Perbedaan PPKM Level 1 2 3 dan 4 hingga Daftar Daerah Terbaru Se-Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/d-5905438/perbedaan-ppkm-level-1-2-3-dan-4-hingga-daftar-daerah-terbaru-se-indonesia>, 15 Agustus 2022.

- Herawati, Y. (2014). *Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*. *Paradigma*, 18(1), pp. 20–27. Available at: <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/download/2404/204>.
- KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses 15 Agustus 2022.
- Kompas, “Apa Itu Subsidi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya di Indonesia”, <https://money.kompas.com/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian-jenis-dan-contohnya-di-indonesia>, 15 Agustus 2022
- Kompas.com, “PPKM Adalah Singkatan dari Perberlakukan Pembatasan Kegiatan”, <https://money.kompas.com/read/2021/07/10/092118826/ppkm-adalah-singkatan-dari-perberlakukan-pembatasan-kegiatan>, 15 Agustus 2022.
- Merdeka.com, “Apa Itu Social Distancing dan Cara Menerapkannya di Berbagai Tempat”, <https://www.merdeka.com/jatim/apa-itu-social-distancing-dan-bagaimana-penerapannya-klm.html>, 15 Agustus 2022.
- Maliana, I. (2021). *Faktor Kekayaan Pejabat Meningkatkan Drastis Selama Pandemi Pengamat Pengeluarannya Berkurang*. *tribunnews*. Available at: <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/13/faktor-kekayaan-pejabatmeningkat-drastis-selama-pandemi-pengamat-pengeluarannya-berkurang>.
- Ratih, K., & Junaidi, A. (2020). *Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace)*. Prosiding Seminar Stiami,7 (2).<http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.
- Super User, Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Per 31 Desember 2018, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, Diakses 15 Agustus 2022.
- Super User, Rekapitulasi LHKPN, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/statistik-lhkpn>, Diakses 15 Agustus 2022.
- Pikiran rakyat, “Apa Itu Kartu Prakerja? Ini Pengertian, Syarat, Cara Daftar, dan Sasarannya”,<https://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094760959/apa-itu-kartu-prakerja-ini-pengertian-syarat-cara-daftar-dan-sasarannya>, 15 Agustus 2022.
- Wikipedia, “Luhut Binsar Panjaitan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Luhut_Binsar_Panjaitan, 15 Agustus 2022.

Wikipedia, “Nadiem Makarim”, https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim,
15 Agustus 2022.

Peraturan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014

Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

Perpres Nomor 92 Tahun 2019

Pasal 4 Perpres Nomor 92 Tahun 2019

Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

UU Covid